PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Survey Pada 15 KPP di Kanwil DJP Jabar 1)

Asep Muhamad Mulya Fermana

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Tax revenues are the main source of state revenues, so it is very useful tax revenue for national development. The greater the ability of the tax revenue would be useful for a better country for national development, government expenditure, as well as the needs of the country. There are many factors that influence does not reach the target of tax revenue, but in this study the amount of tax compliance and effective tax payers as a means to increase tax revenues. This study aimed to analyze the effect of tax compliance and the number of effective taxpayers to tax revenues.

The method used in this research is descriptive and verification methods. The unit of observation in this study was 15 KPP in DJP Jabar 1. Statistical test used is the classical assumption test, multiple linear regression analysis, correlation analysis, the coefficient of determination, and hypothesis testing using SPSS application support for Microsoft Windows.

These results indicate that partial, Compliance taxpayers significant effect on tax revenue and the number of effective taxpayers a significant effect on tax revenue.

Keywords: Taxpayer Compliance, Number of Effective Taxpayers and Tax Revenues

I. Pendahuluan

Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos penerimaan negara, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan, Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat, Maka dari itu Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi,2006).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, Semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu negara dan juga semua masyarakatnya, Atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk membayarkan pajaknya kepada negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak (Moh Zain, 2007:67).

Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan kenegaraan dan fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sudah pasti memerlukan dana untuk membiayai pemerintahan, dana yang diperlukan tersebut itu salah satunya bersumber dari pungutan pajak dari rakyatnya, kita sebagai masyarakat sebagai pihak yang diberi perlindungan oleh pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi tersebut yang ditunjukan melalui keikutsertaannya dalam membiayai pembiayaan negara (Siti Kurnia,2010).

Sumber penerimaan negara terbesar dari pajak, Semakin sadar bangsa ini memenuhi kewajibannya (untuk membayar pajak dengan benar) membawa kebaikan bagi negara karena

kita bisa lebih meningkatkan lagi pembangunan di negeri ini, membangun infrastruktur, kesehatan, transportasi dan lain-lain (Susilo Bambang Yudhoyono 2012).

Pemerintah Republik Indonesia setiap tahun menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan RAPBN disusun berdasarkan tahun anggaran yang dimulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 maret tahun berikutnya, yang menggambarkan tentang penerimaan negara dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:86).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi itu dengan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya, karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak dan sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal, kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assesment,* dimana wajib pajak bertnggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devanto, 2006:158).

Berdasarkan dengan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah Seberapa besar Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak dan Seberapa besar Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak.

Adapun kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis sebagai bahan masukan khususnnya mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowark yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah Suatu iklim kepatuhan dan kesadaraan pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

menurut Chaizi Nasucha (2004:38) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan wajib pajak melalui tingkat pelaporan SPT, laporan penyelesaian tunggakan pajak dan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

Wajib Pajak Efektif

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif Dan Wajib Pajak Non Efektif, yang dimaksudkan dengan Wajib Pajak efektif menurut SE DJP Nomor SE - 26/PJ.2/1988 adalah Wajib Pajak efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya.

Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:325) Penerimaan Pajak adalah Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Penerimaan Pajak menurut para ahli seperti yang di kemukakan oleh H. Simanjuntak Timbul dan Imam Mukhlis (2012:30) adalah Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak

Menurut penelitian (Suryadi, 2006) menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak, Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap kinerja penerimaan pajak.

Sedangkan menurut (Diaz priantara, 2012:109) menyatakan bahwa Peran serta Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Hubungan antara Jumlah Wajib Pajak Efektif dengan Penerimaan Pajak

Rochmat Soemitro dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:90) mengungkapkan kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk :

a. Perluasan dan peningkatan wajib pajak
b. Perluasan obyek pajak
c. Penyempurnaan tarif pajak
d. Penyempurnaan administrasi perpajakan.

Sedangkan Chairuddin Syah Nasution dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000” (2003) menyatakan bahwa Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui PPh maka prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah WP, sehingga cukup tepat kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan lapor pajak bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP tersebut. Hal ini untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah memenuhi syarat memiliki NPWP maupun bagi badan usaha yang bersangkutan.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian adalah sebagai berikut:

H_1 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
H_2 : Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Definisi objek penelitian menurut Sugiyono (2009:32) pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan definisi objek penelitian, maka yang menjadi objek penelitian yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, jumlah wajib pajak efektif dan penerimaan pajak.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Moh. Nazir (2003:84) menyatakan bahwa Desain Penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Menurut Sugiyono (2009:50) menjelaskan proses penelitian dapat disimpulkan seperti teori sebagai berikut:

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan.

Operasionalisasi Variabel

Umi Narimawati (2007:61) mengemukaan Operasionalisasi variabel adalah Operasionalisasi variabel merupakan proses penguraian variabel penelitian kedalam subvariabel, dimensi, indikator subvariabel, dan pengukuran.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak.

Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Sekunder, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang diperoleh dari Kanwil DJP Jabar 1.

Populasi dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak ada beberapa langkah, antara lain dengan penelitian lapangan seperti Dokumentasi (*Filling)*, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), serta searcing (internet).

Rancangan Analisis

1. Analisis Deskriptif
2. Analisis Verifikatif:
   a. Analisis Korelasi *Pearson*
   b. Analisis Korelasi Berganda
   c. Analisis Koefisien Determinasi

Pengujian Hipotesis

1. Penetapan Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t):

H_{o1}: $\beta_1 = 0$: Secara parsial Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak .

H_{a1}: $\beta_1 \neq 0$: Secara parsial Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

H_{o1}: $\beta_1 = 0$: Secara parsial Jumlah Wajib Pajak Efektif tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak .

H_{a1}: $\beta_1 \neq 0$: Secara parsial Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

2. Menguji tingkat signifikansi

Tingkat signifikan ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel–variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam status penelitian.

3. Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut:

a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_o ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X_1, X_2 dan variabel Y ada pengaruhnya;
b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_o ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X_1, X_2 dan variabel Y tidak ada pengaruhnya;
c. t_{hitung} : dicari dengan rumus perhitungan t_{hitung}.
d. t_{tabel}: dicari di dalam tabel distribusi t *student* dengan ketentuan sebagai berikut α = 0,05 dan df = (jumlah data/n-k-1).

Gambar 3.1
Kurva Pengujian Hipotesis Parsial

IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak pada 15 KPP di Kanwil DJP Jabar 1

Dari 15 KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 yang memiliki jumlah Pembayaran SKPKB paling banyak selama periode 2011-2012 adalah KPP Madya dibandingkan dengan KPP Pratama Sukabumi, KPP Pratama Cianjur, KPP Pratama Purwakarta, KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Tegallega, KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Karees, KPP Pratama Tasikmalaya, KPP Pratama Bojonegara, KPP Pratama Cicadas, KPP Pratama Ciamis, KPP Pratama Garut, KPP Pratama Majalaya, dan KPP Pratama Soreang, hal ini dikarenakan KPP Madya hanya menangani wajib pajak badan dimana kewajiban perpajakannya relatif lebih besar daripada wajib pajak orang pribadi.

Deskriptif Jumlah Wajib Pajak Efektif Pada 15 KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1

Dari 15 KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 yang memiliki jumlah wajib pajak efektif paling banyak selama periode 2011-2012 adalah KPP Pratama Cimahi dibandingkan dengan KPP Madya, KPP Pratama Sukabumi, KPP Pratama Cianjur, KPP Pratama Purwakarta, KPP Pratama Tegallega, KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Karees, KPP Pratama Tasikmalaya, KPP Pratama Bojonegara, KPP Pratama Cicadas, KPP Pratama Ciamis, KPP Pratama Garut, KPP Pratama Majalaya, dan KPP Pratama Soreang, hal ini dikarenakan rasio kepatuhan penyampaian SPT Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Cimahi lebih tinggi daripada KPP lainnya. Hal ini menunjukkan Jumlah Wajib Pajak Efektif pada 15 KPP tersebut jauh berbeda dikarenakan adanya perbedaan rasio kepatuhan penyampaian SPT dimana penentuan status wajib pajak tersebut menjadi efektif atau non efektif dilihat dari pelaporan penyampaian SPT. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988.

Deskriptif Penerimaan Pajak Pada 15 KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1

Penerimaan pajak paling tinggi adalah dari KPP Pratama Madya hal ini dikarenakan KPP Pratama Madya hanya menangani wajib pajak badan dimana kewajiban perpajakannya relatif lebih besar daripada wajib pajak orang pribadi. Secara keseluruhan penerimaan pajak sudah tinggi, hal ini bisa dilihat dari rata-rata pencapaian target penerimaan pajak mencapai 100,46%. Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran penerimaan pajak berdasarkan KPP masing-masing.

Analisis Verifikatif

Hasil analisis statistik dari penelitian ini adalah:

1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik
    a. Uji Asumsi Normalitas diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansi yang diperoleh variabel bebas dan variabel terikat lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa model regresi telah terdistribusi normal
    b. Uji Asumsi Multikolinieritas, diperoleh dari nilai VIF masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Hal ini menunjukan bahwa tidak diantara kedua variabel bebas tidak memiliki korelasi yang kuat, sehingga asumsi multikolinieritas data terpenuhi.
    c. Uji Asumsi Heteroskedastisitas bahwa nilai signifikansi yang diperoleh kedua variabel bebas lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti menunjukan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
    d. Uji Asumsi Autokorelasi pada pengujian autokorelasi digunakan uji *Durbin-Watson* untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Dengan menggunakan rumus $Y= a + b_1X_1 + b_2X_2$

Dari hasil perhitungan koefisien regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y= 6035390093{,}549 +45{,}831X_1+8320682{,}759X_2$$

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dapat diinterpretasikan masing-masing koefisien adalah konstanta sebesar 6035390093,549 menunjukkan nilai rata-rata perubahan Penerimaan Pajak jika perubahan Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Efektif sama dengan nol. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki koefisien bertanda positif sebesar 45,831 artinya setiap kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 45,831 dengan asumsi Jumlah Wajib Pajak tidak berubah. Jumlah Wajib Pajak memiliki koefisien bertanda positif sebesar 8320682,759 artinya setiap kenaikan Jumlah Wajib Pajak sebesar 1 satuan diprediksi akan menaikan Penerimaan Pajak sebesar 8320682,759 dengan asumsi Kepatuhan Wajib Pajak tidak berubah.

Koefisien Korelasi

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan, maka dilakukan analisis korelasi *pearson*. Korelasi *pearson* digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen yaitu antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak. Korelasi antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,476 dengan arah positif. Artinya Kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan yang kuat dengan Penerimaan Pajak. Arah positif menunjukkan bahwa ketika Kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak juga meningkat.

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak

Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak, maka dilakukan analisis korelasi *pearson*. Korelasi *pearson* digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen yaitu antara Jumlah Wajib Pajak Efektif dengan Penerimaan Pajak. Korelasi antara Jumlah Wajib Pajak Efektif dengan Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,546 dengan arah positif. Artinya Jumlah Wajib Pajak Efektif memiliki hubungan dengan Penerimaan Pajak. Arah positif menunjukkan bahwa ketika Jumlah Wajib Pajak Efektif meningkat maka Penerimaan Pajak akan juga meningkat.

Analisis Koefisien Determinasi

Dengan menggunakan rumus : Kd = B x Zero Order x 100%

Pengaruh X_1 terhadap Y = 0,556 x 0,476 x 100 % = 26,46%
Pengaruh X_2 terhadap Y = 0,618 x 0,546 x 100 % = 33,74%

Dari hasil perhitungan bahwa Jumlah Wajib Pajak Efektif (X_2) memberikan kontribusi pengaruh paling dominan terhadap Penerimaan Pajak (Y) dengan kontribusi yang diberikan sebesar 33,74%, sedangkan 26,46% diberikan oleh Kepatuhan Wajib Pajak (X_1).

Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah mengenai ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti, dimana (Ha) merupakan hipotesis tentang adanya pengaruh, yang pada umumnya dirumuskan untuk ditolak sedangkan hipotesis tandingan (Ho) merupakan hipotesis penelitian. Hipotesis yang akan diuji adalah sejauh mana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak.

Pengujian Secara Parsial X_1 Terhadap Y

Diketahui nilai t_{hitung} untuk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 4,540. Nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai t_{tabel}. t_{tabel} diperoleh dari tingkat kepercayaan dengan taraf nyata α=0,05,dimana df=n-k-1, dan t (α;n-k-1), maka tabel distribusi t dengan α=0,05 dan df=n– k-1 =30-3-1 = 27. Maka t (0,05;27) =2,05183.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,540 > 2,051). Artinya H_{a1} berada di daerah penerimaan dan H_{o1} ditolak ,menjelaskan bahwa secara parsial Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Karena setiap peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak diikuti dengan peningkatan Penerimaan Pajak. Jika digambarkan, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} untuk pengujian parsial variabel Kepatuhan Wajib Pajak tampak sebagai berikut:

Gambar 4.1

Kurva Hipotesis Uji Parsial Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pengujian Secara Parsial X_2 terhadap Y

Diketahui nilai t_{hitung} untuk Jumlah Wajib Pajak Efektif sebesar 5,048. Nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai t_{tabel}. t_{tabel} diperoleh dari tingkat kepercayaan dengan taraf nyata α=0,05 dimana df=n-k-1, dan t(α;n-k-1), maka tabel distribusi t dengan α=0,05 dan df=n–k-1 =30-3-1 = 27. Maka t (0,05;27) =2,05183.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ (5,048 > 2,051). Artinya H_{a1} berada di daerah penerimaan dan H_{o1} ditolak ,menjelaskan bahwa secara parsial Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Karena setiap peningkatan pada Jumlah Wajib Pajak Efektif diikuti dengan peningkatan Penerimaan Pajak. Jika digambarkan, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} untuk pengujian parsial variabel Jumlah Wajib Pajak Efektif.

Gambar 4.2

Kurva Hipotesis Uji Parsial Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak

4.2 Pembahasan

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berbanding searah dengan Penerimaan Pajak yang dilaporkan. Dimana jika Kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak juga akan meningkat.

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan dengan Penerimaan Pajak sebesar 26,46% dan sisanya 73,54% disebabkan oleh faktor lain seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Siti Kurnia, 2010:140).

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa Jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Efektif berbanding searah dengan Penerimaan Pajak yang dilaporkan. Dimana jika Jumlah Wajib Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak juga akan meningkat.

Jumlah Wajib Pajak Efektif memiliki pengaruh yang signifikan dengan Penerimaan Pajak sebesar 33,74% dan sisanya 66.26% disebabkan oleh faktor lain seperti kepatuhan penyampaian SPT Masa dan Tahunan dan tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan.

v. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan pada Bab IV, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut:

1. Secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berbanding searah dengan penerimaan pajak yang dilaporkan. Yang dimana jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka Penerimaan Pajak juga akan meningkat.
2. Secara parsial Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak dan dapat dikatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Efektif berbanding searah dengan Penerimaan Pajak yang dilaporkan.yang dimana jika Jumlah Wajib Pajak Efektif meningkat maka Penerimaan Pajak juga akan meningkat.

5.2 Saran Akademis

1. Bagi pengembangan ilmu akuntansi, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak dan jumlah wajib pajak efektif, tetapi dapat juga digunakan variabel lain agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dalam mengetahui variabel apa saja yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara parsial maupun simultan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menambah informasi tambahan pemikiran dan kajian dalam peneltian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dan jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak, Selain itu juga peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

Alhusin, Syahri. 2003. *Aplikasi Statistik Dengan SPPS.10 For Windows*, Yogyakarta:Penerbit Graha Ilmu

Ancok, Djamaludin, 2004 *Psikologi Terapan (Applied Psychology*). Jogjakarta Darussalam.

Arief, Sritua, 2006. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta:UI

Devano, Sony. dan Siti Kurnia Rahayu, 2006. *Perpajakan* : Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta : Kencana.

Djatnika, Adjat. 2012. *Kepatuhan Wajib Pajak Jabar Rendah* diakses melalui www.wartapajak.com

Djatnika, Adjat. 2014 *Pertumbuhan Penerimaan Pajak Di Jabar I Melambat*. diakses melalui financial.bisnis.com

Ghozali, I. (2001). *Analisis Multivanate dengan program SPSS*. Edisi ke 2. universitas Diponegoro.

Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometrika Dasar : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

Gustiawan S. Uwon. 2007. *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: PT Grasindo.

Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hutagaol. John. 2007. *Perpajakan Isu- Isu Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Ilyas, Wirawan B. dan Rudi Suhartono. 2013. *Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan*. Salemba Humanika.

Juniarti, Siscka Mirela. 2013. *Tingkat Kesadaran Masyarakat Cianjur Rendah.* diakses melalui www.inilahkoran.com

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan.* Edisi Revisi 2002. Yogyakarta : Andi.

Martoewardojo, Agus. 2012. *Kejar Setoran Rp 1.178 Triliun, Agus Marto Seret Wajib Pajak Bandel*. Diakses dari www.detik.com

Martoewardojo, Agus. 2013. *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*. diakses melalui www.pajak.go.id

Martoewardojo, Agus. 2013. *Ini Alasan Penerimaan Pajak tidak Capai Target*. diakses melalui www.dannydarussalam.com

Mashuri. 2008. *Penelitian Verifikatif.* Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.

Narimawati, Umi, Sri Dewi Anggadini, Linna Ismawati. (2010*). Penulisan Karya Ilmiah* Bekasi : Genesis.

Narimawati, Umi. 2007, *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Agung Media.

Narimawati, Umi. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Nascuha, Chaizi. 2004, *Reformasi Administrasi Publik, teori dan praktik*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Nasution, Chairuddin Syah. 2003 Jurnal. *Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000*.

Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Nurmantu, Safri, 2009. *Kepatuhan Perpajakan*. [Online].Tersedia: http://www.google.com .[14 April 2009].

Priantara. Diaz. 2012, *perpajakan Indonesia edisi 2*, Jakarta, penerbit mitra wacana media.

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal.* Yogyakarta:Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan : Teori & Kasus*. Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 6, Jakarta : Salemba Empat.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis.* Jilid 1 Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis.* Jilid 2 Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta

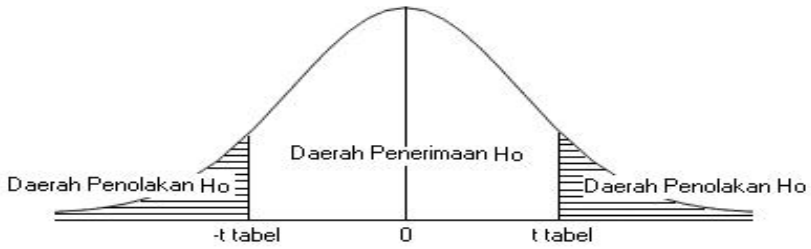
Simanjuntak, H. Timbul dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung : Alfabeta.

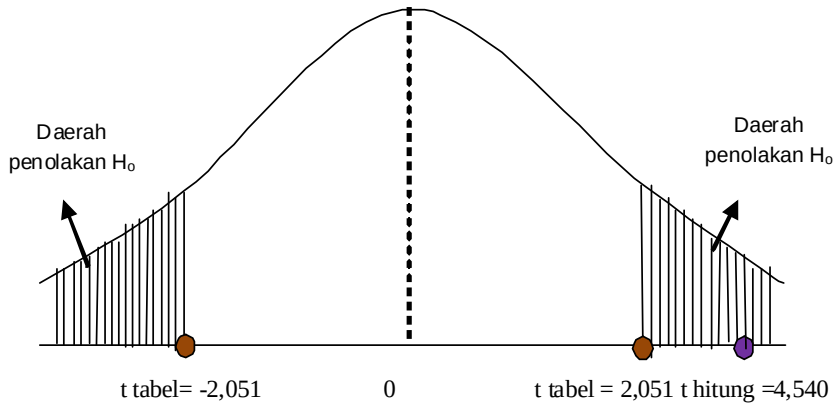
Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan Kedelapan. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung : Alfabeta
Suliyanto, 2005, *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*, Edisi Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia.
Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Jakarta Barat: Indeks.
Sunar, Dwi. 2011, *Panduan Lengkap Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan & Petunjuk Pengisian SPT*, Jakarta : Laksana.
Suparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPFE.
Suparmoko. 2010.*Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta : BPEF.
Supriati. 2012 *Metode Penelitian* Bandung : Labkat Press UNIKOM.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 26/PJ.2/1988.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 89/PJ/2009.
Suryadi, 2006, *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur*, Jurnal Keuangan Republik, Vol. 4, No. 1, P.105-121
Suryadi. (2006). *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. *Jurnal Keuangan Publik, 4(1),* 105-121.
Susilo Bambang Yudhoyono. 2012. *Sumber Penerimaan Negara Terbesar dari Pajak.* diakses melalui www.beritasatu.com
Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
UU No.16 tahun 2000 tentang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU No.28 tahun 2007 tentang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU No.6 tahun 1983 tentang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku II.* Salemba Empat: Jakarta
Wirawan B.Ilyas dan Rudy Suhartono, 2012. *Perpajakan.* Jakarta: Mitra Wancana Media
Zain, Mohammad. 2007,*Manejemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN

a.

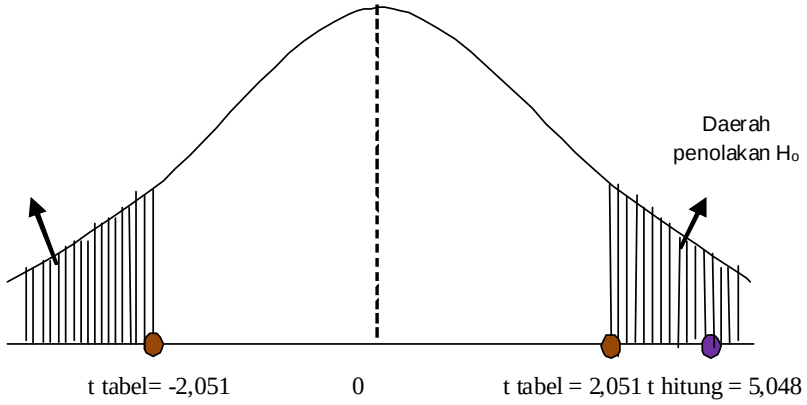


Gambar 3.1
Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t



Gambar 4.1

Kurva Hipotesis Uji Parsial Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak



Gambar 4.2

Kurva Hipotesis Uji Parsial Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak